

PENGEMBANGAN POLA RUANG IBUKOTA KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU

Amiany¹

Abstraksi

Permasalahan pada perencanaan kota yang selalu berlanjut dari waktu ke waktu akan tersandung pada perilaku masyarakat yang timbul diluar perencanaan pemerintah. Menyingkapi jamaknya permasalahan perkotaan, menyebabkan timbulnya menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan ruang, sarana dan prasarana.

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten pemekaran yg mengalami perkembangan yang cukup tinggi ini, termasuk Kota Bawan yang merupakan ibukota Kecamatan Banama Tingang terletak pada bagian Tengah Sungai Kahayan jalan poros Palangka Raya – Kuala Kurun dan memiliki lokasi yang tepatnya terletak di bagian paling utara dari Kabupaten Pulang Pisau. Potensi pengembangan kota Bawan adalah tersedianya lahan kosong yang cukup besar dengan ditunjang oleh letak kawasan yang cukup strategis dibagian utara kabupaten Pulang Pisau dimana dapat merupakan gerbang pergerakan masyarakat dan barang dari kabupaten tetangga.

Ketersediaan lahan kosong yang luas ini memberi peluang yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan pengawasan pengembangan kawasan serta mengurangi konflik akibat dari kesulitan pengaturan penggunaan lahan. Perkembangan Masyarakat yang terdapat di Ibukota Kecamatan Banama Tingang memiliki adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari, sehingga patut diperhatikan pula dalam pengembangan Ibukota Kecamatan ini kedepannya agar bisa berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimilikinya.

Kata Kunci : *Pola Ruang, Ibu Kota Kecamatan*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada hakekatnya disebabkan oleh pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi serta perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh perubahan pola sosial budaya dan sosial ekonomi penduduk tersebut sebagai masyarakat kota. Sejalan dengan pertambahan penduduk daerah perkotaan menurut Panudju (1999) mengakibatkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan terutama kebutuhan perumahan.

Permasalahan pada perencanaan kota yang selalu berlanjut dari waktu ke waktu akan tersandung pada perilaku masyarakat yang timbul diluar perencanaan pemerintah. Menyingkapi jamaknya permasalahan perkotaan, menyebabkan timbulnya menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan ruang, sarana dan prasarana;

¹ Staf Pengajar di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten pemekaran yg mengalami perkembangan yang cukup tinggi ini, termasuk Kota Bawan yang merupakan ibukota Kecamatan Banama Tingang terletak pada bagian Tengah Sungai Kahayan jalan poros Palangka Raya – Kuala Kurun dan memiliki lokasi yang tepatnya terletak di bagian paling utara dari Kabupaten Pulang Pisau. Potensi pengembangan kota Bawan adalah tersedianya lahan kosong yang cukup besar dengan ditunjang oleh letak kawasan yang cukup strategis dibagian utara kabupaten Pulang Pisau dimana dapat merupakan gerbang pergerakan masyarakat dan barang dari kabupaten tetangga. Ketersediaan lahan kosong yang luas ini memberi peluang yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan pengawasan pengembangan kawasan serta mengurangi konflik akibat dari kesulitan pengaturan penggunaan lahan. Perkembangan Masyarakat yang terdapat di Ibukota Kecamatan Banama Tingang memiliki adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari, sehingga patut diperhatikan pula dalam pengembangan Ibukota Kecamatan ini.

Ha ini merupakan bagian dari antisipasi dampak perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan menjadi pusat pertumbuhan dan guna merencanakan Ibukota Kecamatan Banama Tingang untuk memacu perputaran ekonomi lebih cepat dan volume perdagangan yang lebih besar kedepannya.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang pemilihan judul, disimpulkan rumusan permasalahan “Bagaimana Pengembangan Pola Ruang Ibukota Kecamatan Banama Tingang di Kabupaten Pulang Pisau? “

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan penelitian di wilayah studi yaitu mengkaji pengembangan pola ruang ibukota kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

LANDASAN TEORI

Pengertian-pengertian yang digunakan dan berkaitan ruang kota sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
11. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
12. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Ketentuan Pengembangan Pola Ruang Ruang Kota

Agar pembangunan daerah berhasilguna dan berdayaguna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka RDTR yang telah disusun juga perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka memperoleh kekuatan dan kepastian hukum, maka perlu dibuat menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan untuk menjamin keefektifan mekanisme pengelolaan tata ruang ini, maka perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai guna mengoperasionalkan perencanaan yang telah disusun.

Salah satu fungsi RDTR adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun dan melaksanakan program dua puluh tahun, lima tahun dan program tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu 20 tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Kecamatan banama Tingang. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan IKK Banama Tingang yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.

Rencana Detail Tata Ruang Ibukota kecamatan Banama Tingang merupakan dasar pola pengembangan ruang Kawasan yang harus didukung oleh pola pengembangan sektor-sektor serta program-program pembangunan. Untuk mencapai tujuan pengembangan ruang yang diharapkan, maka disiapkan indikasi program jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah kota dan Instansi terkait dalam memanfaatkan ruang untuk berbagai kegiatan.

Indikasi program menjadi pedoman dalam memanfaatkan ruang dalam mengelola kawasan lindung, mengembangkan kawasan budidaya, sektor-sektor ekonomi dominan, pengembangan sistem permukiman dan perkotaan, sistem transportasi dan prasarana lainnya, serta pengembangan kawasan khusus secara optimal dan berkelanjutan.

Seluruh penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan untuk dapat disesuaikan dengan arahan rencana tata ruang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengawasan, melalui perijinan kegiatan dan bangunan. Selanjutnya untuk dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, perlu pemantapan sistem koordinasi, mekanisme perijinan dan berbagai perantara serta sarana lain yang diperlukan harus dilakukan. Hal ini untuk memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana.

Penyusunan indikasi program didasarkan pada pertimbangan berikut ini :

1. Tujuan dan konsep pengembangan tata ruang
2. Karakteristik struktur ruang
3. Tahapan pengembangan
4. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Dalam penelitian ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dalam bentuk data-data yang bisa di analisa dengan kajian diskripsi.

ANALISIS DATA

Teknik analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis diskriptif membahas tentang :

- Karakteristik pola ruang ibukota kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Meliputi ;
 - Orientasi wilayah perencanaan
 - Fisik dasar
 - Karakteristik penduduk
 - Karakteristik penggunaan lahan
 - Sistem transportasi
 - Pelayanan Fasilitas

Tahap ketiga merupakan tahap analisa yang meliputi : Analisis secara diskriptif dari fenomena variabel-variabel pola ruang ibukota kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang diperoleh secara primer dan sekunder.

Metode literatur/ daftar pustaka, yaitu menggunakan buku-buku sebagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan pola ruang ibukota kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

VARIABEL PENELITIAN.

Dalam penelitian mengenai pola ruang ibukota kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, dengan variabel penelitian yang digunakan adalah

- Orientasi wilayah perencanaan
- Fisik dasar

- Karakteristik penduduk
- Karakteristik penggunaan lahan
- Sistem transportasi
- Pelayanan Fasilitas

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

No.	Pengembangan Pola Ruang Ibukota	
	Variabel	Hasil Analisa
1.	Orientasi Wilayah Perencanaan	<p>berdasarkan pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), maka IKK Banama Tingang termasuk dalam SWP III dengan pusat pengembangan berada pada Kota Bawan, dimana berdasarkan struktur ruang Kabupaten Pulang Pisau, Kota Bahaur berkedudukan sebagai kota orde 3, dan berdasarkan struktur ruang Propinsi Kalimantan Tengah Kota Bawan berkedudukan sebagai kota orde II. Sehingga, IKK Banama Tingang merupakan kawasan yang memiliki kedudukan dan peran sebagai wilayah/kawasan yang akan menampung perkembangan Kota Palangka raya dan Kuala Kurun sebagai pusat regional Propinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa kawasan pertanian, hutan produksi, dan perkebunan yang dapat menjadi wilayah/kawasan <i>hinterland</i> bagi kawasan-kawasan yang lain.</p> <p>Keberadaan Kota Bawan sebagai pusat pertumbuhan regional Kabupaten Pulang Pisau pada saat ini memiliki jangkauan pelayanan meliputi keseluruhan wilayah kecamatan. Atau dengan kata lain, Kota Bawan menjadi kota transit bagi kegiatan perekonomian, terutama eksternal antar wilayah kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah. Adanya pemusatan kegiatan regional di Kota Bawan ini, maka diperkirakan akan muncul perkembangan perkotaan dari segi perdagangan/perekonomian yang akan memacu tumbuhnya perkembangan kegiatan penggunaan lahan yang lain, dimana perkembangan penggunaan lahan ini nantinya dapat mempengaruhi penataan ruang di IKK Banama Tingang.</p>
2.	Analisis Struktur Ruang	<p>IKK Banama Tingang memiliki peluang untuk memiliki pusat-pusat wilayah. Hal ini terlihat dari adanya faktor lokasi ekonomi, dimana IKK Banama Tingang merupakan kawasan yang dilalui oleh koridor Palangka Raya – Kuala Kurun, sehingga IKK Banama Tingang sangat memungkinkan untuk tumbuh menjadi daerah transit atau wilayah pusat pengembangan sektor-sektor perekonomian yang semula memanfaatkan koridor tersebut. Selain itu, potensi kawasan ini juga ditunjang dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, dilihat dari luasan penggunaan lahan pada saat ini terdapat kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan IKK Banama Tingang sebagai bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) utara Kabupaten Pulang Pisau, yaitu sebagai wilayah <i>hinterland</i> bagi pusat-pusat</p>

		<p>pertumbuhan kegiatan masyarakat yang ada, sehingga pada masa yang akan datang kawasan ini tidak lagi menjadi wilayah <i>hinterland</i> bagi pusat-pusat pertumbuhan yang ada, namun berpeluang menjadi pusat penyediaan bahan baku bagi kegiatan perdagangan/jasa (perekonomian), khususnya di sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam.</p> <p>Potensi-potensi perkembangan IKK Banama Tingang diatas juga didorong oleh adanya investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk menjadikan IKK Banama Tingang berkembang ke jalan negara koridor Palangka Raya – Kuala Kurun sebagai wilayah pemekaran IKK Banama Tingang. Kota Bawan, yang akan datang sudah tidak lagi dapat menampung perkembangan kota dikarenakan oleh faktor fisik bentang alam Kota Bawan yang hampir setiap tahun mengalami ancaman banjir. Dengan adanya dukungan investasi oleh pihak pemerintah daerah tersebut, maka diperkirakan akan muncul aglomerasi-aglomerasi kegiatan kawasan pada wilayah-wilayah tertentu dan mendorong kegiatan-kegiatan yang serupa untuk mengelompok, dan pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah baru.</p> <p>ditetapkan hierarki kawasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sub pusat kawasan (BWK I.) terletak di Kota lama Bawan sekitar bantaran sungai.</i> Penentuan kawasan kota lama sebagai sub pusat kawasan didasarkan pada ketersediaan/kelengkapan tipe fasilitas di kawasan ini menempati peringkat kedua dan jumlah penduduk menempati peringkat pertama. - <i>Pusat kawasan (BWK II) terletak di IKK kawasan baru.</i> Penentuan Baru ini sebagai pusat kawasan didasarkan pada kondisi fisik IKK ini yang menempati urutan pertama dan adanya program investasi pemerintah untuk menjadikan BWK II sebagai pusat pemerintahan kecamatan Banama Tingang dan adanya rencana pemerintah untuk memindahkan fasilitas vital yang semula berada di Kota Lama Bawan ke BWK II ini, meskipun dilihat dari jumlah penduduk, unit dan tipe fasilitas desa ini menempati peringkat kedua.
3.	<p>Analisis Kondisi Fisik Dasar</p>	<p>Unsur topografi atau permukaan lahan merupakan salah satu unsur dalam mengukur kemampuan lahan suatu kawasan. Hal ini dikarenakan unsur topografi dapat menunjukkan bentuk permukaan lahan dalam menentukan kawasan potensial yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan kegiatan kawasan. Berdasarkan kondisi eksisting, IKK Banama Tingang merupakan kawasan dengan kelerengan 3 – 8 % dan ketinggian 22 – 48 meter diatas permukaan laut. Dengan kondisi topografi tersebut, secara keseluruhan IKK Banama Tingang memiliki kondisi permukaan lahan cenderung landai sampai datar berombak pada bagian pengembangan baru. Dapat dikembangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tanpa melakukan perubahan fisik secara besar-besaran. Selain itu, datarnya kawasan ini memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan terbangun kecuali pada kawasan</p>

		<p>sempadan sungai dan daerah genangan. Dan tentunya akan menjadi perhatian guna pengembangan sistem jaringan air limpasan pada wilayah Perencanaan.</p> <p>IKK Banama Tingang memiliki keuntungan lokasi yang terletak pada ketinggian 22 – 48 meter diatas permukaan air laut sehingga tidak terancam oleh bencana banjir yang sering melanda Kota Bawan (lama) tiap tahun.</p> <p>Sedangkan, berdasarkan kondisi eksisting geologi IKK Banama Tingang, memiliki jenis tanah aluvial, podsol, dan regosol. Dengan mempertimbangkan tekstur tanah demikian, maka IKK Banama Tingang sangat bagus jika dikembangkan sebagai kawasan perkotaan sebab mempunyai sifat fisik yang relatif bagus dan tahan terhadap erosi. Sehingga dalam perencanaan perlu adanya penanganan-penanganan khususnya di daerah bantaran sungai dan daerah dataran tinggi agar tidak menimbulkan erosi.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Karakteristik Penggunaan Lahan</p>	<p>IKK Banama Tingang memiliki lahan tidak terbangun yang mampu dikembangkan sebagai pusat kawasan kota yang akan menampung perkembangan Kota Bawan sebagai pusat pelayanan kecamatan. Penggunaan lahan di IKK Banama Tingang pada tahun 2010 didominasi oleh kebun campuran,rawa/genangan dengan luas 9782,28 Ha dari total luas wilayah IKK Banama Tingang. Sedangkan, penggunaan lahan paling sedikit berupa kawasan permukiman dengan luas 348,72 Ha.</p> <p>IKK Banama Tingang memiliki lahan tidak terbangun yang mampu dikembangkan sebagai pusat kawasan kota yang akan menampung perkembangan Kota Bawan sebagai pusat pelayanan kecamatan. Penggunaan lahan di IKK Banama Tingang pada tahun 2010 didominasi oleh kebun campuran,rawa/genangan dengan luas 9782,28 Ha dari total luas wilayah IKK Banama Tingang. Sedangkan, penggunaan lahan paling sedikit berupa kawasan permukiman dengan luas 348,72 Ha.</p> <p>IKK Banama Tingang memiliki keuntungan lokasi yang terletak pada ketinggian 22 – 48 meter diatas permukaan air laut sehingga tidak terancam oleh bencana banjir yang sering melanda Kota Bawan (lama) tiap tahun. Hal ini merupakan potensi yang berpengaruh besar terhadap pola perkembangan serta pertumbuhan wilayah di IKK Banama Tingang yang diperuntukkan bagi pemusatan fungsi-fungsi pemerintahan/fasilitas-fasilitas pelayanan yang dianggap vital, dengan didukung adanya jalur penghubung antar desa/kecamatan yang sudah beraspal yang melalui wilayah tersebut. Dalam perencanaan lebih lanjut, perlu diatur alokasi penggunaan lahan untuk kegiatan pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan/jasa ataupun industri (jika dimungkinkan) dalam komposisi yang tepat sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap pembangunan di IKK Banama Tingang, sebaliknya mampu memberi kontribusi sebagai pusat pelayanan dan pengembangan ekonomi regional terkait fungsi dan peran IKK Banama Tingang di Kabupaten Pulang Pisau</p>

5.	Analisis Kependudukan	Berdasarkan data Profil desa tahun 2006 - 2010, jumlah penduduk IKK Banama Tingang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata (r) sebesar 3,26 %, sehingga diproyeksikan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan pada tahun 2031 penduduk IKK Banama Tingang menjadi 1.561 jiwa.
6.	Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelayanan	<p>Dalam upaya perencanaan IKK Banama Tingang sebagai kawasan ibukota kecamatan, maka perlu adanya pengembangan dari fasilitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan peribadatan. Semuanya harus direncanakan sesuai suatu penataan lokasi-lokasi dari fasilitas perdagangan, sehingga terjadi distribusi sektor perdagangan dan jasa. Pendistribusian perdagangan dan jasa ini perlu adanya suatu perencanaan yang matang untuk menciptakan suatu kehidupan yang seimbang. Terciptanya suatu kondisi yang dinamis antara penduduk IKK Banama Tingang dengan tingkat pelayanan khususnya perdagangan dan jasa maka pemenuhan fasilitas perdagangan dan jasa ini harus disesuaikan dengan standar kebutuhan fasilitas sehingga sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlaku di IKK Banama Tingang. disusul pula Fasilitas Pendidikan, Kesehatan</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan sarana perdagangan/jasa tersebut hingga tahun 2031, jumlah fasilitas pasar yang ada di IKK Banama Tingang yang ada sekarang sudah memenuhi kebutuhan warga dan tidak perlu dilakukan penambahan, akan tetapi untuk ke depannya perlu dilakukan peningkatan skala pelayanan agar semakin mendukung perencanaan IKK Banama Tingang . Sedangkan, untuk fasilitas warung dan pertokoan juga tidak perlu dilakukan penambahan dan pembangunan melihat jumlah penduduk masih sedikit. Pengalokasian fasilitas/sarana perdagangan di IKK Banama Tingang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan fasilitas perdagangan disesuaikan dengan rencana jaringan jalan dan didukung oleh utilitas yang baik. - Memiliki lokasi dekat dengan lokasi permukiman dan terjangkau oleh transportasi umum.
7.	Analisis Sistem Transportasi Kawasan	Pola pergerakan yang terjadi di IKK Banama Tingang sangat dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan terutama pusat-pusat aktivitas masyarakat. Pola pergerakan di IKK Banama Tingang merupakan interaksi antara aktivitas-aktivitas dan waktu berlangsungnya aktivitas tersebut. Di masa mendatang, beberapa daerah di IKK Banama Tingang akan merupakan daerah tarikan dan bangkitan pergerakan, seperti kawasan pusat Kota Bawan yang merupakan kawasan pemerintahan dan perkantoran, pendidikan, dan perdagangan. Pola yang terjadi menunjukkan pergerakan cenderung dari daerah pinggiran menuju pusat kota dan sebaliknya pada waktu berakhirnya aktivitas. Hal ini terjadi akibat pusat kota merupakan tempat berkumpulnya berbagai aktivitas kegiatan kota. Pemusatan aktivitas kota pada pusat kota menyebabkan terjadinya tarikan yang cukup besar dari daerah-daerah bangkitan yaitu permukiman.

		Pola pergerakan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh sistem jaringan transportasi yang berpadu dengan pola fungsi lahan yang ada. Penataan sistem jaringan transportasi yang baik dibutuhkan untuk menciptakan pola pergerakan lebih merata, maka penyelenggaraan transportasi darat, sungai harus benar-benar dipertimbangkan kedepannya.
--	--	--

KESIMPULAN PENELITIAN

Sebagai Ibukota Kecamatan Banama Tingang, Kota Bawan dengan jarak ± 190 Km dari Kota Pulang Pisau dan ± 90 Km dari Kota Palangka Raya, ruasa Jalan Palangka Raya-Kurun berfungsi sebagai pusat koleksi (pengumpul) produksi perkebunan rakyat (karet) dan merupakan daerah belakang (hinterland) Kota Palangka Raya. Aksesibilitas pergerakan barang dan orang lebih tinggi ke Kota Palangka Raya (ibukota provinsi), jika dibandingkan ke Kota Pulang Pisau sebagai pusat pemerintahannya. Sehingga kebutuhan primair dan sekunder Kota Bawan dapat dipenuhi dari Kota Palangka Raya dibandingkan ke Pulang Pisau, baik menggunakan transportasi sungai maupun melalui jalan darat. Sedangkan Kota Pulang Pisau keterikatan hanyalah dari aspek pemerintahan dan administrasi saja.

Pengembangan pola hubungan sistem kegiatan perekonomian (interaksi dan orientasi kegiatan) Kota Bawan dengan Kabupaten yang terdekat dan berbatasan dengan Kabupaten lainnya sangat kuat, diantaranya Kota Kuala Kurun (Kabupaten Gunung Mas). Disamping itu jarak yang lebih dekat dengan Kota Palangka Raya (± 90 Km) sebagai salah pintu masuk ke Kabupaten Pulang Pisau dari arah Utara dan sekaligus berfungsi sebagai hinterland Kota Palangka Raya, maka Kota Bawan sebagai pusat menjadi lintasan pertukaran (produksi pertanian/perkebunan dan distribusi) kebutuhan yang berlangsung saling menguntungkan.

Kemudahan dalam hal aksesibilitas sangat penting bagi warga masyarakat IKK Banama Tingang yang juga menyebabkan kecenderungan warga untuk memilih tempat tinggal yang lengkap dengan sarana dan prasarana transportasi, sehingga dapat memperlancar mobilitas dan aksesibilitas masyarakat khususnya untuk memasarkan berbagai hasil komoditi pertanian dan perkebunan. Masyarakat lebih memilih bertempat tinggal di sepanjang jalan baik jalan lokal maupun jalan lingkungan karena kelancaran aksesibilitas, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kemudahan mobilitas. Selain dimanfaatkan sebagai tempat tinggal di sepanjang jalan lokal maupun lingkungan juga dimanfaatkan sebagai kegiatan perdagangan dan jasa, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah terkait mengenai rencana pemanfaatan lahan serta adanya pemerataan pembangunan fasilitas di IKK Banama Tingang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, Eko. 1994. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djemabut, Blaang. 1986, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.

- Heinz Frick. 1984. *Rumah Sederhana Kebijakan Perencanaan dan Kontruksi*, Konisius, Yogyakarta.
- Haryadi, Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Kerjasama Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- Ibrahim, Jabal T. 2002. *Sosiologi Pedesaan*, UMM Pres, Malang.
- Kuswartojo, Tjuk dkk, *Perumahan dan permukiman di Indonesia*, ITB Bandung, 2005
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Telaah Positivistik, Raionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.
- Riwut, Tjilik, 1997, *Kalimantan memanggil*, Yogyakarta
- Wijanarka, 2008, *Desain Tepi Sungai*, Penerbit Ombak, Yogyakarta